

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. H. dan S. (2006). No Title. *Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64.
- Abdul Halim. (2002). *Akuntansi Sektor Publik (Pertama)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. (2003). *Analisis Investasi (Pertama)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. (2013). *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Affandi, R. dan A. (2014). ALOKASI BELANJA MODAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK : *Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 71–90.
- Ajija. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anthony, R. N. dan V. G. (1995). *Manajemen Control System*. (Eight, Ed.). Tangerang: International Student Edition.
- Asepma Hygi Prihastuti, Taufeni Taufik, dan R. A. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten / Kota Riau. *Sorot*, 10(2), 143–154.

- Bahtiar Arif, M. dan I. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Akademia.
- Indra Bastian. (2006). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016a). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016b). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. (Edisi Pertama, Ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Christina, N. dan V. (2015). *Metodologi Penelitian Akuntansi Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Eisenhardt, K. (1989). Agency Theory: An Assesment and Review. . *Academy of Management Review*.
- Ellliya Agus, muhammad S. (2016). Kinerja Keuangan Daerah dan Pembiayaan Belanja Modal Kabupaten Merangin. *Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 37–50.
- Erlina, Omar Sakti Rambe, dan R. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ferani. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Ilmiah*, 20(2), 109–120.
- Ghozali, I. (2014). *Ekonometrika: Teori, Konsep dan*

- Aplikasi dengan IBM SPSS 22*. Semarang: Undip.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Kuncoro, M. (2003). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2009). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mecklin, J. &. (1976). The Theory of Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownship Structure. *Journal of Financial and Economics*, 3, 305–360.
- Nurlan, D. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Rohmana yana. (2010). *Ekonometrika: Teori dab Aplikasi dengan Eviews*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Ekonomi dan Bisnis FPEB UPI.
- Royda. (2016). Pengaruh Efisiensi dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal di Bangka Belitung. *Ilmiah Orasi Bisnis*, 15, 78–89.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- Sukirno, S. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Bima BG Grafika.
- Syaiful. (2008). *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Brang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Syamsi, I. (1986b). *Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Ulum, I. (2009). *Intelectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Uma, S. (2011). *Research methods for business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Umi, N. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: ALFABETA
- Wahyudi. (2006). *Manajemen Konflik dalam Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wibisono, D. (2005). *Metode Penelitian & Analisis Data*. . Jakarta: Salemba Medika.
- Winarno, W. W. (2015). *Analisis Ekonomerika dan Statistik dengan Eviews (Keempat)*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Yulia, Yustikasari. (2014). Kubungan Antara Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum, dan Kapasitas Fiskal Terhadap Belanja Modal (Studi kasus pada pemerintah daerah se-Jawa-Bali baik kabupaten/kota. *PRIVITA*, 6(3), 336–346

Indonesia (2004). Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Indonesia (2004). Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Keuangan Daerah

Indonesia (2003). Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Indonesia (2004). Undang-Undang No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Indonesia (2010). Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang

Indonesia (2006). Permendagri No.13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Indonesia (2011). Permendagri No. 21 tahun 2011 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah

Indonesia (2006). Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No.59 tahun 2007 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Indonesia (2011). Permendagri No.21 tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006

Indonesia (2011). Peraturan menteri keuangan No. 101 tahun 2011 tentang Klaifikasi anggaran

Dini Mulyani , 2017

PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2013-2015

universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Indonesia (2005). PP No. 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Indonesia (2000). PP No. 109 tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Indonesia (2000). PP No. 110 tahun 2000 Tentang Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat

Indonesia (2004). PP No. 24 tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Indonesia (2005). PP No. 37 tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Indonesia (2010). PP N0.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

